



IPB University
— Bogor Indonesia —

LAPORAN KEUANGAN TA 2025 (AUDITED) **IPB**

Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

KEMENDIKTI SAINTEK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

(Audited)

**DITJEN DIKTI
PTNBH – INSTITUT PERTANIAN BOGOR
(693408)**



**BOGOR
2025**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Institut Pertanian Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Mei 2026

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan
Infrastruktur



Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T.
NIP. 197708122005012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	17
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	23
Lampiran	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2.	Neraca	2
Tabel 3.	Laporan Operasional	3
Tabel 4.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
Tabel 5.	Kualitas Piutang	8
Tabel 6.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	9
Tabel 7.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	10
Tabel 8.	Rincian DIPA IPB	12
Tabel 9.	Rincian Estimasi & Realisasi Pendapatan	12
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 11.	Perbandingan Pagu Anggaran & Realisasi Belanja	13
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	14
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	15
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	16
Tabel 15.	Neraca	17
Tabel 16.	Laporan Operasional	19
Tabel 17.	Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	20
Tabel 18.	Rincian Beban Pegawai	20
Tabel 19.	Rincian Kegiatan Non Operasional	21
Tabel 20.	Laporan Perubahan Ekuitas	23



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Mei 2026

Wakil Rektor

Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur

H Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T.
NIP. 197708122005012001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker 693408 (PTNBH-IPB) Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.72.389.614 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.299.768.996.358 atau mencapai 99,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.300.260.621.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp.0 antara lain Uang Muka Belanja (prepayment) sebesar Rp.0 dan Piutang Bukan Pajak (netto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0, Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. dan Ekuitas sebesar Rp.0.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0 antara lain Uang Muka Belanja (prepayment) sebesar Rp.0 dan Piutang Bukan Pajak (netto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.14.036.072 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.299.768.996.358 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.299.754.960.286. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.58.353.542 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.299.696.606.744.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tanggal pelaporan dibandingkan dengan tanggal pelaporan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 0. Defisit-LO tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.299.696.606.744, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk tanggal 31

Desember 2025 sebesar Rp.0 sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0. Transaksi Antar Entitas untuk tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.299.696.606.744, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0. Sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0 dan untuk Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DITJEN DIKTI (PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Tabel 1.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025		% thd Angg	31-Des-2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	72.389.614	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	72.389.614	0,00	-
BELANJA	B.2	-	-	0,00	-
Belanja Pegawai	B.2.1	300.260.621.000	299.768.996.358	99,84	-
Belanja Barang	B.2.2	-	-	0,00	-
Belanja Modal	B.2.3	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		300.260.621.000	299.768.996.358	99,84	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)**

**NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Tabel 2.**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.1	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.1.2	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		-	-
ASET TETAP	C.1.2		
JUMLAH ASET TETAP		-	-
ASET LAINNYA	C.1.3		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.1.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)**

**LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Tabel 3.**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D		
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	14.036.072	-
JUMLAH PENDAPATAN		14.036.072	-
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	299.768.996.358	-
Beban Persediaan	D.2.2	-	-
Beban Barang Jasa	D.2.3	-	-
Beban Pemeliharaan	D.2.4	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D.2.6	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	-	-
JUMLAH BEBAN		299.768.996.358	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(299.754.960.286)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3.2	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	58.353.542	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		58.353.542	-
POS LUAR BIASA	D.4		
Beban Luar Biasa	D.4.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(299.696.606.744)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DITJEN DIKTI
(PTN-BH INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Tabel 4.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SUPLUS/DEFISIT LO	E.2	(299.696.606.744)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan	E.4.1	-	-
Koreksi Lain-lain	E.4.2	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	299.696.606.744	-
EKUITAS AKHIR		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis IPB

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

IPB sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PTN badan hukum adalah *flagship* perguruan tinggi di tanah air dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu IPB sebagai PTN badan hukum dituntut untuk menyelenggarakan mandat tridharma yang bermutu tinggi, menyediakan akses pendidikan bermutu tinggi dan terjangkau bagi masyarakat, menyelenggarakan tata kelola PTN yang andal dan akuntabel, serta menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Kegiatan dan layanan tersebut terefleksikan di dalam visi dan misi IPB dan program-program yang diturunkan dalam visi dan misi tersebut IPB mempunyai visi:

“Menjadi perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan dalam membangun *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.”

Dengan misi:

1. Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.
2. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa.
3. Mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan

IPB sebagai salah satu entitas dalam Kementerian Negara/Lembaga terus meningkatkan akuntabilitas dalam hal laporan keuangan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Institut Pertanian Bogor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Institut Pertanian Bogor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan IPB dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Akuntansi yang merupakan entitas pelaporan dari IPB. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan IPB adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lain-lain.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

IPB memperoleh alokasi anggaran awal untuk tahun 2025 berupa belanja pegawai sebesar Rp.300.260.621.000. Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.299.768.996.358, Selama periode berjalan, IPB telah melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA. Pelaksanaan anggaran ini dilakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat perencanaan anggaran. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Rincian DIPA IPB
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran Semula	Anggaran Akhir (Setelah Revisi)	Naik/Turun
Pendapatan			
Pendapatan PNPB	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	-	-	0,00
Belanja			
Belanja Pegawai	282.740.170.000	300.260.621.000	6,19
Belanja Barang	-	-	0,00
Belanja Modal	-	-	0,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah Belanja	282.740.170.000	300.260.621.000	6,19

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi Pendapatan
Rp.72.389.614*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.72.389.614 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan IPB adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari akun 425151-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi serta Pendapatan Lainnya yang berasal dari akun 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan 425931-Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	14.036.072	0,00
Pendapatan Pendidikan	-	-	0,00

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Lain-Lain	-	58.353.542	0,00
Jumlah	-	72.389.614	0,00

Tabel 10.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per Desember 2025	Realisasi per Desember 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya :			
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	14.036.072	-	100,00
Pendapatan Lain-lain :			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	51.021.542	-	100,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	7.332.000	-	100,00
Jumlah	72.389.614	-	100,00

Realisasi Belanja
Rp.299.768.996.358

B.2 Belanja

Realisasi Belanja IPB sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.299.768.996.358 atau 99,84% dari anggaran belanja sebesar Rp.300.260.621.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Sampai Dengan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Realisasi	
	31 Desember 2025	(%)	31 Desember 2024	(%)
Belanja Pegawai	299.768.996.358	99,84	-	0,00
Belanja Barang	-		-	0,00
Belanja Modal	-		-	0,00
Belanja Bantuan Sosial	-		-	0,00
Jumlah	299.768.996.358	99,84	-	0,00

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi perubahan/pergantian nomenkelatur kementerian baru dari BA.023.17.677546 Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek (PTN BH - Institut Pertanian Bogor) menjadi BA.139.03.693408 Ditjen Dikti Kemendiktisaintek (PTN BH - Institut Pertanian Bogor). Sehingga realisasi belanja 31 Desember 2024 bernilai Rp.0.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.299.768.996.358

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.299.768.996.358 dan Rp.0. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 100% dari TA 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi perubahan/pergantian nomenkelatur kementerian baru dari BA.023.17.677546 Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek (PTN BH - Institut Pertanian Bogor) menjadi BA.139.03.693408 Ditjen Dikti Kemendiktisaintek (PTN BH - Institut Pertanian Bogor). Sehingga realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 bernilai Rp.0.

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	+/- (%)
Belanja Gaji Pokok PNS	126.408.688.020	-	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.257.123	-	100,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9.791.096.376	-	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	2.155.342.240	-	100,00
Belanja Tunj. Fungsional	16.301.398.000	-	100,00
Belanja Tunj. PPh PNS	2.226.191.157	-	100,00
Belanja Tunj. Beras PNS	5.534.553.660	-	100,00
Belanja Uang Makan PNS	14.817.445.000	-	100,00
Belanja Tunj. Umum PNS	2.134.895.000	-	100,00
Belanja Tunj. Profesi Dosen	63.393.146.100	-	100,00
Belanja Tunj. Kehormatan Profesor	55.023.276.600	-	100,00
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.009.258.500	-	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	687.522.132	-	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.409	-	100,00

Uraian	Realisasi	Realisasi	+/-
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(%)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	45.786.297	-	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.157.057	-	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	62.946.662	-	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	42,939,025	-	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	119,090,000	-	100,00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	-	0,00
Jumlah Belanja	299,768,996,358	-	100,00

Belanja Barang Rp.0

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 IPB tidak memiliki pagu Belanja Barang.

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	-	-	0,00
Belanja Persediaan	-	-	0,00
Belanja Jasa	-	-	0,00
Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0,00
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Barang	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Belanja Modal Rp.0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 IPB tidak memiliki pagu Belanja modal sehingga realisasinya adalah Rp.0.

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	-	-	0,00

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial
Rp.0

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Hal ini disebabkan karena IPB tidak memiliki pagu Belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Tabel 15.

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.1	-	-
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	C.1.1.2	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		-	-
ASET TETAP	C.1.2		
JUMLAH ASET TETAP		-	-
ASET LAINNYA	C.1.3		
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.1.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Aset Lancar Rp.0

C.1. Aset

C.1.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

Piutang Bukan
Pajak
Rp.0

C.1.1.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak satker IPB sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Uang Muka Belanja
(*Prepayment*)
Rp.0

C.1.1.2 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Jumlah Uang Muka Belanja (*Prepayment*) satker Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

Aset Tetap
Rp.0

C.1.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

Aset Lainnya
Rp.0

C.1.2. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp.0*

C.2. Kewajiban

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0*

C.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Ekuitas
Rp.0*

C.3. EKUITAS

C.3.1. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Operasional

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Tabel 16.

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
KEGIATAN OPERASIONAL	D		
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	14.036.072	-
JUMLAH PENDAPATAN		14.036.072	-
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	299.768.996.358	-
Beban Persediaan	D.2.2	-	-
Beban Barang Jasa	D.2.3	-	-
Beban Pemeliharaan	D.2.4	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	-	-
JUMLAH BEBAN		299.768.996.358	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(299.754.960.286)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3.2	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	58.353.542	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		58.353.542	-
POS LUAR BIASA	D.4		
Beban Luar Biasa	D.4.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(299.696.606.744)	-

D. KEGIATAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN

D.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan akrual berasal dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha, pendapatan pendidikan dan pendapatan lain-lain yang merupakan pengembalian atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya serta Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp.14.036.072

Jumlah Pendapatan sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.14.036.072 dan Rp.0. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari :

Tabel 17.
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	14.036.072	-
Jumlah	14.036.072	-

D.2. BEBAN

Beban Pegawai
Rp.299.768.996.358

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.299.768.996.358 dan Rp.0.

Tabel 18.
Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pegawai	299.768.996.358	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-
Beban Lembur	-	-
Jumlah	299.768.996.358	-

Beban Persediaan
Rp.0

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Barang Jasa
Rp.0

D.2.3. Beban Barang Jasa

Beban Barang Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban
Pemeliharaan Rp.0

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.0

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp.0

D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Bantuan
Sosial
Rp.0

D.2.6. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kegiatan non
Operasional
Rp.58.353.542

D.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.58.353.542 dan Rp.0, yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp.0

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang
Rp.0

D.3.2 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.58.353.542

D.3.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.58.353.542 dan Rp.0.

Tabel 19.
Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2024 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.353.542	-
Jumlah	58.353.542	-

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.4. POS LUAR BIASA

D.4.1 Beban Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Tabel 20.

URAIAN	CATATAN	31-Des-2025	31-Des-2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SUPPLUS/DEFISIT LO	E.2	(299.696.606.744)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
EKUITAS	E.4	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan	E.4.1	-	-
Koreksi Lain-lain	E.4.2	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	299.696.606.744	-
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-

Ekuitas Awal
Rp.0.

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Defisit LO
Rp.299.696.606.744

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Defisit sebesar Rp.299.696.606.744 dan Rp.0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi
Rp.0

E.3. Koreksi yang Manambah/Mengurangi

Nilai Koreksi yang menambah/mengurangi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Ekuitas Rp.0

E.4. Ekuitas

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Transaksi Antar Entitas
Rp.299.696.606.744

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.299.696.606.744 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp.0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek (PTN BH – Institut Pertanian Bogor)
Tahun Anggaran 2025 (*Audited*)

Laporan-laporan Pendukung

Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN sampai dengan periode 2025-12
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2025
Neraca per 31 Desember 2025
Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2025
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2025
Laporan Realisasi Pendapatan Per Akun Per 31 Desember 2025
Laporan Realisasi Belanja Per Akun Per 31 Desember 2025
Neraca Percobaan (Basis Akrua) Per 31 Desember 2025
Neraca Percobaan (Basis Kas) Per 31 Desember 2025
Neraca Percobaan (Basis Saldo Awal) Per 31 Desember 2025
Telaah LK Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BOGOR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693408 - DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 10:43

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	299,895,157,000	299,895,157,000	0
2	Belanja	300,260,500,987	300,260,500,987	0
3	Pengembalian Belanja	-491,504,629	-491,504,629	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	72,389,614	72,389,614	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 139
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 03
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 693408

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:46 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	72,389,614	72,389,614	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	72,389,614	72,389,614	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	72,389,614	72,389,614	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	300,260,621,000	299,768,996,358	(491,624,642)	100	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	300,260,621,000	299,768,996,358	(491,624,642)	100	0	0	0	0
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 139
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 03
SATUAN KERJA : DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) 693408

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:46 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	300,260,621,000	299,768,996,358	(491,624,642)	100	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan.:

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

DR. ALIM SETIAWAN/SLAMET, S.T.P., M.Si.
NIP 198202272009121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 06/05/26 9:58 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,036,072	0	14,036,072	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,036,072	0	14,036,072	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,036,072	0	14,036,072	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	299,768,996,358	0	299,768,996,358	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	0	0	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 06/05/26 9:58 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	299,768,996,358	0	299,768,996,358	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(299,754,960,286)	0	(299,754,960,286)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,353,542	0	58,353,542	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,353,542	0	58,353,542	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	58,353,542	0	58,353,542	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(299,696,606,744)	0	(299,696,606,744)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(299,696,606,744)	0	(299,696,606,744)	()

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

DR. ALIM SETIAWAN SLAMET, S.T.P., M.Si.
NIP 198202272009121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:46 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(299,696,606,744)	0	(299,696,606,744)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	299,696,606,744	0	299,696,606,744	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

DR. ALIM SETIAWAN SLAMET, S.T.P., M.Si.
NIP 198202272009121001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 139 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 693408 **DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 9:40 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,036,072	0	14,036,072	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	14,036,072	0	14,036,072	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,021,542	0	51,021,542	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,332,000	0	7,332,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	58,353,542	0	58,353,542	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	72,389,614	0	72,389,614	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	72,389,614	0	72,389,614	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 139
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 693408
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
JAWA BARAT
DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 9:39 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	116,066,684,000	126,781,537,000	126,781,536,080	372,848,060	126,408,688,020	99.71	372,848,980
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	700,000	1,455,000	1,454,793	197,670	1,257,123	86.4	197,877
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9,555,000,000	9,822,136,000	9,822,135,216	31,038,840	9,791,096,376	99.68	31,039,624
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,290,000,000	2,161,248,000	2,161,247,479	5,905,239	2,155,342,240	99.73	5,905,760
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,000,000,000	16,363,043,000	16,363,043,000	61,645,000	16,301,398,000	99.62	61,645,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	940,000,000	2,226,192,000	2,226,191,157	0	2,226,191,157	100	843
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,078,000,000	5,550,559,000	5,550,558,480	16,004,820	5,534,553,660	99.71	16,005,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	15,765,000,000	14,817,445,000	14,817,445,000	0	14,817,445,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,120,000,000	2,138,760,000	2,138,760,000	3,865,000	2,134,895,000	99.82	3,865,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	65,568,620,000	63,393,238,000	63,393,146,100	0	63,393,146,100	100	91,900
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	46,926,880,000	55,023,295,000	55,023,276,600	0	55,023,276,600	100	18,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	280,310,884,000	298,278,908,000	298,278,793,905	491,504,629	297,787,289,276	99.84	491,618,724
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,138,800,000	1,009,260,000	1,009,258,500	0	1,009,258,500	100	1,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	1,138,800,000	1,009,260,000	1,009,258,500	0	1,009,258,500	100	1,500
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	880,090,000	687,523,000	687,522,132	0	687,522,132	100	868
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	584,000	8,000	7,409	0	7,409	92.61	591
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	88,010,000	45,787,000	45,786,297	0	45,786,297	100	703
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,522,000	14,158,000	14,157,057	0	14,157,057	99.99	943
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	80,280,000	62,947,000	62,946,662	0	62,946,662	100	338
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	60,000,000	42,940,000	42,939,025	0	42,939,025	100	975
511628	Belanja Uang Makan PPPK	170,000,000	119,090,000	119,090,000	0	119,090,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	8,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,290,486,000	972,453,000	972,448,582	0	972,448,582	100	4,418
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	282,740,170,000	300,260,621,000	300,260,500,987	491,504,629	299,768,996,358	99.84	491,624,642
	JUMLAH BELANJA	282,740,170,000	300,260,621,000	300,260,500,987	491,504,629	299,768,996,358	99.84	491,624,642

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	--

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Rektor

DR. ALIM SETIAWAN SLAMET, S.T.P., M.SI.

NIP 198202272009121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	299,768,996,358
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	72,389,614	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,036,072
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,021,542
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,332,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	126,408,688,020	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,267,123	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	9,791,096,376	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,155,342,240	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16,301,398,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,226,191,157	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,534,553,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	14,817,445,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,134,895,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	63,393,146,100	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	55,023,276,600	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,009,258,500	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	687,522,132	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,409	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,786,297	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	14,157,057	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	62,946,662	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	42,939,025	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	119,090,000	0
JUMLAH			299,841,385,972	299,841,385,972

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Rektor

DR. ALIM SETIAWAN SLAMET, S.T.P., M.Si.

NIP 198202272009121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (693408) DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:36 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	299,768,996,358
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	72,389,614	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,036,072
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,021,542
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	7,332,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	126,781,536,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,454,793	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9,822,135,216	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,161,247,479	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,363,043,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,226,191,157	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,550,558,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	14,817,445,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,138,760,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	63,393,146,100	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	55,023,276,600	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,009,258,500	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	687,522,132	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,409	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,786,297	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	14,157,057	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	62,946,662	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42,939,025	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	119,090,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	372,848,060
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	197,670
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	31,038,840
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	5,905,239
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	61,645,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	16,004,820
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,865,000
JUMLAH			300,332,890,601	300,332,890,601

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

DR. ALIM SETIAWAN SLAMET, S.T.P., M.Si.
198202272009121001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 139
UNIT ORGANISASI : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 693408

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
JAWA BARAT
DITJEN DIKTI (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR)

Tgl. Cetak 14/01/2026 5:13 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)

Kode dan Nama UAKPA : (693408) PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 Kode dan Nama UAPPAW : (0200) JAWA BARAT
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 Kode dan Nama K/L : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal selter telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNB		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Noni DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/1719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-		-

2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-	-	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resipokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?		✓	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		✓	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		√	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai		✓	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		✓	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		✓	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?		✓	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SikPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		✓	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		✓	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?		✓	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		✓	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		✓	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		✓	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		✓	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		✓	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		✓	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

--	--

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Darsono, SE., MM
NIP 197410212008121003

Bogor, Mei 2026
Penelaah,



Widaryanti, S.Pi., MM
NIP 202105197901302001